



JURNAL ILMIAH

GEMA PERENCANA

Volume 3, Nomor 1, Mei - Agustus 2024
Halaman 1 - 166

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK -----	i - x
ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEUANGAN DI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA, UIN ALAUDDIN MAKASSAR Sitti Jauhari -----	1 - 20
ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS AKREDITASI DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI Nasrullah Sulaiman -----	21 - 36
STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG Nurul Fajri -----	37 - 50
KEBIJAKAN OPTIMALISASI ANGGARAN MELALUI REVISI ANGGARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR A. Gustang -----	51 - 68
PELESTARIAN LEMBAGA PERKAWINAN: UPAYA MENCEGAH DAMPAK EKONOMI KRISIS SEKS DAN DEPOPULASI AKIBAT PRAKTIK <i>CHILDFREE</i> , <i>WAITHOOD</i> , DAN <i>FREESEX</i> DI INDONESIA Tan Gusli -----	69 - 88
STRATEGI MANAJEMEN MENINGKATKAN MUTU PEGAWAI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR Hadijah Ahmad -----	89 - 112

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA
OELETA – KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Gaspar Tokan ----- 113 - 128

PEMBANGUNAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS POTENSI
KEDAERAHAN PADA PROVINSI ACEH

Hasanul Fikri ----- 129 - 148

KEBIJAKAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN
PENINGKATAN MODAL SOSIAL DI KOTA PADANG

Khairulmen ----- 149 - 166



SALAM REDAKSI

Pembaca Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa-Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayat-Nya, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** ini dapat terbit kembali sebagai Edisi Lanjutan, yaitu: **Volume 3 Nomor 1, Mei-Agustus 2024**. Setelah mendapatkan E-ISSN (*Electronic-International Standard Serial Number*), saat ini juga sudah memperoleh P-ISSN (*Printing-International Standard Serial Number*) dari Pusat Nasional ISSN Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** telah terdaftar dan mendapatkan Nomor *Digital Object Identifier* (DOI) dari **The Crossref**.

Jurnal ini dalam pengelolaannya menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA*. Kami berharap, pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih cepat, lebih efektif, dan lebih luas melalui media *online*. Di samping itu, Jurnal ini tetap dicetak secara *hardcopy*, walaupun dengan jumlah halaman dan tiras yang terbatas.

Pada **Volume 3 Nomor 1, Mei-Agustus 2024** ini, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** menerbitkan 9 (sembilan) artikel, yang kesemuanya berasal dari para Perencana di lingkungan Kementerian Agama RI. Kesembilan artikel tersebut tersaji sesuai dengan ruang lingkup (*scope and focus*) yang telah ditetapkan Tim Editorial **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA**. Artikel-artikel yang tampil dalam Jurnal ini lebih menekankan pada kajian “Kebijakan Perencanaan” (*Policy paper*) bidang: Sosial, Ekonomi, Spasial, dan Pendidikan, dalam perspektif Agama dan Keagamaan.

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan maupun pengembangan pengetahuan di bidang kegiatan masyarakat.

Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2024

Dewan Redaksi



LEMBAR ABSTRAK

Sitti Jauhari

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: stjauhari60@gmail.com

INGGRIS

FINANCIAL PLANNING POLICY ANALYSIS AT THE FACULTY OF ADAB AND HUMANIORA, UIN ALAUDDIN MAKASSAR

This Policy paper describes financial planning policy issues at the Faculty of Adab and Humanities (FAH) UIN Alauddin Makassar, which focuses on (1) the process of preparing financial planning policies, (2) elements and provisions contained in financial planning policies, (3) implementation financial planning policies at FAH UIN Alauddin Makassar, as well as (4) monitoring and evaluating the effectiveness and efficiency of financial planning policies. This study uses a qualitative method with a case study approach, where data is collected through interviews with key informants, observation, and documentation. The results show that the financial planning policy at FAH UIN Alauddin Makassar has been well formulated and involves various parties. However, there are several obstacles in implementing policies, such as a lack of understanding by staff and limited resources as well as monitoring and evaluation of the effectiveness and efficiency of financial planning policies. Thus, financial planning policies at FAH UIN Alauddin Makassar need to be optimized by: (1) Increasing staff understanding of policies through education and training; (2) Strengthening monitoring and evaluation systems to ensure policy effectiveness and efficiency; and (3) Improving coordination between various parties involved in financial planning.

Keywords: Policy, Financial Planning, Management, Financial Analysis, Evaluation, Monitoring

INDONESIA

ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEUANGAN DI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA, UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Policy paper ini menguraikan masalah kebijakan perencanaan keuangan di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Alauddin Makassar, yang berfokus pada: (1) proses penyusunan kebijakan perencanaan keuangan, (2) elemen dan ketentuan yang tercantum dalam kebijakan perencanaan keuangan, (3) implementasi kebijakan perencanaan keuangan di FAH UIN Alauddin Makassar, serta (4) monitoring dan evaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan perencanaan keuangan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan keuangan di FAH UIN Alauddin Makassar telah dirumuskan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak. Namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya pemahaman oleh staf dan keterbatasan sumber daya serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan perencanaan keuangan. Dengan demikian, kebijakan perencanaan keuangan di FAH UIN Alauddin Makassar perlu dioptimalkan dengan: (1) Meningkatkan pemahaman staf tentang kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan; (2) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan; serta (3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan keuangan.

Kata Kunci: Kebijakan; Perencanaan Keuangan, Manajemen, Analisis Keuangan, Evaluasi, Monitoring

Nasrullah Sulaiman

Institut Agama Islam Negeri Kendari
Email: nasrullahsulaiman83@gmail.com

**POLICY ANALYSIS OF BUDGETTING
BASED ON ACCREDITATION AT
THE STATE ISLAMIC INSTITUTE OF
KENDARI**

This policy paper describes the problem of accreditation-based budget policy at IAIN Kendari, namely that universities are faced with pressure to improve quality and competitiveness, including through increasing the accreditation of study programs and institutions. Meanwhile, budget management that focuses on accreditation is an important strategy to support these efforts. By carefully allocating resources to support activities that support the achievement of accreditation standards, universities can ensure the efficient and effective use of their funds. This article uses a qualitative method with a literature study approach, where the author refers extensively to existing primary and secondary data and sources. The results show that the main challenge in accreditation-based budget management at IAIN Kendari is the lack of a regulatory framework that regulates the budget proposal process oriented towards increasing accreditation. Without clear guidance, the allocation of funds to support increased accreditation can be undirected and less effective. Thus, the author recommends that to ensure the success of an accreditation-based budget management policy, concrete steps are needed, such as synergy with the institution's main performance indicators, making clear regulations, active involvement of Quality Assurance Institutions, increasing awareness and training, as well as ongoing monitoring and evaluation.

Keywords: Budget Policy; Regulation; Accreditation; College; IAIN Kendari

**ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN
BERBASIS AKREDITASI DI INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Policy paper ini menguraikan masalah kebijakan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari bahwa perguruan tinggi dihadapkan pada desakan untuk meningkatkan mutu dan daya saing, termasuk melalui peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Sementara pengelolaan anggaran yang berfokus pada akreditasi menjadi strategi penting dalam mendukung upaya tersebut. Dengan mengalokasikan sumber daya dengan cermat untuk mendukung kegiatan yang mendukung pencapaian standar akreditasi, perguruan tinggi dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang dimiliki. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi pustaka, di mana penulis banyak merujuk pada data dan sumber primer dan sekunder yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari adalah kurangnya kerangka regulasi yang mengatur proses pengusulan anggaran berorientasi pada peningkatan akreditasi. Tanpa panduan yang jelas, alokasi dana untuk mendukung peningkatan akreditasi dapat menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Dengan demikian penulis merekomendasikan bahwa untuk memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan anggaran berbasis akreditasi, langkah-langkah konkret diperlukan, seperti sinergi dengan indikator kinerja utama institusi, pembuatan regulasi yang jelas, keterlibatan aktif Lembaga Penjaminan Mutu, peningkatan kesadaran dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Anggaran; Regulasi; Akreditasi; Perguruan Tinggi; IAIN Kendari

Nurul Fajri

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung

Email: nfajri76@yahoo.co.id

**DIGITAL TRANSFORMATION
STRATEGY TO IMPROVE
PERFORMANCE AND PUBLIC
SERVICES AT THE REGIONAL OFFICE
OF THE MINISTRY OF RELIGION,
LAMPUNG PROVINCE**

This policy paper describes that in the digital era, digital transformation has become crucial for enhancing public performance and services. The Lampung Provincial Ministry of Religion (Kanwil Kemenag Lampung) needs to adapt by utilizing digital technology to improve efficiency, effectiveness, and service quality. This policy paper aims to formulate a comprehensive digital transformation strategy for Kanwil Kemenag Lampung to improve public performance and services. This policy paper employs a qualitative research method with literature studies, interviews, and observations. Data is analyzed descriptively to generate a contextual and applicable digital transformation strategy. The analysis results indicate five main pillars of digital transformation for Kanwil Kemenag Lampung: (1) Digital Infrastructure Development: Building a robust and integrated digital infrastructure to support public services; (2) Digital Application Development: Creating innovative digital applications to enhance internal process efficiency and public services; (3) Human Resource Capacity Enhancement: Improving the capacity of Kanwil Kemenag Lampung's human resources in using digital technology; (4) Data Governance Strengthening: Building effective data governance to ensure data security, integrity, and accessibility; and (5) Work Culture Change: Cultivating an adaptive, innovative, and public service-oriented work culture. The conclusion is that digital transformation of Kanwil Kemenag Lampung through the five main pillars can significantly improve public performance and services. Implementing this strategy will assist Kanwil Kemenag Lampung in providing faster, easier, more transparent, and accountable services to the public. Therefore, this paper recommends the need for full commitment and support from all stakeholders to ensure the success of digital transformation at Kanwil Kemenag Lampung. Regular evaluation and monitoring are also necessary to ensure this strategy achieves its objectives.

Keywords: Digital Transformation, Performance, Public Services, Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province

**STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
DAN LAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

Policy paper ini menguraikan bahwa di era digital, transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung perlu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanannya. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi transformasi digital yang komprehensif bagi Kanwil Kemenag Lampung dalam meningkatkan kinerja dan layanan publik. Makalah kebijakan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Data dianalisis deskriptif untuk menghasilkan strategi transformasi digital yang kontekstual dan aplikatif. Adapun hasil analisis ditemukan bahwa ada 5 (lima) pilar utama transformasi digital Kanwil Kemenag Lampung, yaitu: (1) Pengembangan infrastruktur digital: Membangun infrastruktur digital yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung layanan publik; (2) Pengembangan aplikasi digital: Mengembangkan aplikasi digital yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi proses internal dan layanan publik; (3) Peningkatan kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas SDM Kanwil Kemenag Lampung dalam penggunaan teknologi digital; (4) Penguatan tata kelola data: Membangun tata kelola data yang efektif untuk memastikan keamanan, integritas, dan aksesibilitas data; serta (5) Perubahan budaya kerja: Menumbuhkan budaya kerja digital yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada layanan publik. Kesimpulannya bahwa transformasi digital Kanwil Kemenag Lampung melalui lima pilar utama tersebut dapat meningkatkan kinerja dan layanan publik secara signifikan. Penerapan strategi ini akan membantu Kanwil Kemenag Lampung dalam memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan demikian, makalah ini merekomendasikan perlunya komitmen dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital di Kanwil Kemenag Lampung. Evaluasi dan monitoring berkala juga diperlukan untuk memastikan strategi ini mencapai tujuannya.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Kinerja, Layanan Publik, Kementerian Agama Lampung

A Gustang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: agustang@uin-alauddin.ac.id

**BUDGET OPTIMIZATION POLICY
THROUGH BUDGET REVISION IN AN
EFFORT TO INCREASE PERFORMANCE
ACHIEVEMENTS AT UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

This policy paper discusses budget optimization policies through effective and efficient budget revisions to improve the performance achievements of planners at UIN Alauddin Makassar. The budget revision policy is an important tool to ensure the budget is used efficiently, effectively, and accountably. At UIN Alauddin Makassar, there are several obstacles in implementing the budget revision policy, such as low budget absorption, decreased performance achievements, lack of clarity in the budget revision mechanism, slow budget revision process, and lack of stakeholder involvement. This study uses qualitative methods with descriptive data analysis techniques. Data was obtained from document studies and field observations. The study results show inefficiencies in the budget allocation process, budget absorption is still low, and the work culture does not support efficient and effective use of the budget. This study resulted in recommendations that UIN Alauddin Makassar needs to take several steps, such as: preparing clear and comprehensive budget revision guidelines, building a monitoring and evaluation system for the budget revision process, increasing HR capacity in handling the budget revision process, increasing stakeholder involvement in the budget revision process, analyzing the impact of budget revisions on performance achievements before carrying out revisions, increasing synergy between budget revision policies and other policies, and utilizing information technology. By implementing these steps, it is hoped that UIN Alauddin Makassar can increase the optimization of budget absorption, increase the efficiency and effectiveness of budget use, increase performance achievements, increase stakeholder satisfaction, and increase public trust.

Keywords: Performance Achievements, Budget Revisions, Budget Absorption, Policies

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI
ANGGARAN MELALUI REVISI
ANGGARAN DALAM UPAYA
MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA
DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Policy paper ini membahas tentang kebijakan optimalisasi anggaran melalui revisi anggaran yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan capaian kinerja para perencana di UIN Alauddin Makassar. Kebijakan revisi anggaran merupakan salah satu alat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Di UIN Alauddin Makassar, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan revisi anggaran, seperti: serapan anggaran rendah, capaian kinerja menurun, ketidaktegasan mekanisme revisi anggaran, lambatnya proses revisi anggaran, dan kurangnya keterlibatan stakeholder. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Data diperoleh dari studi dokumen dan observasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat inefisiensi dalam proses pengalokasian anggaran, serapan anggaran masih rendah, serta budaya kerja belum mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kajian ini menghasilkan rekomendasi bahwa UIN Alauddin Makassar perlu melakukan beberapa langkah, seperti: menyusun pedoman revisi anggaran yang jelas dan komprehensif, membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap proses revisi anggaran, meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani proses revisi anggaran, meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam proses revisi anggaran, melakukan analisis dampak revisi anggaran terhadap capaian kinerja sebelum melakukan revisi, meningkatkan sinergi antara kebijakan revisi anggaran dengan kebijakan lainnya, dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan UIN Alauddin Makassar dapat meningkatkan optimalisasi serapan anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, meningkatkan capaian kinerja, meningkatkan kepuasan stakeholder, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Capaian Kinerja, Revisi Anggaran, Serapan Anggaran, Kebijakan

Tan Gusli

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Email: tangusli123@gmail.com

**PRESERVATION OF MARRIAGE
INSTITUTIONS: EFFORT TO PREVENT
THE ECONOMIC IMPACT OF SEX
CRISIS AND DEPOPULATION DUE
TO CHILDFREE, WAITHOOD AND
FREESSEX PRACTICES IN INDONESIA**

This policy paper explains that Indonesia as a country supported by religious culture and family spirit does not guarantee freedom from the threat of sexual recession. Currently, there is a movement to postpone marriage (waithood) and be reluctant to have children (childfree) which is widely carried out by the millennial generation, even the practice of free sex has hit students in Indonesia. This study will discuss the practices of Childfree, Waithood, and Freesex in relation to the alleged crisis of trust in the institution of marriage. The approach method used is descriptive qualitative through literature studies. Data shows that there has been a decrease in the number of marriages, an increase in divorce cases, and a decrease in the birth rate in Indonesia. The economic impacts that are feared to arise afterwards are the sex crisis and depopulation as has happened in Japan. Not only that, the case of depopulation in Japan shows a domino effect on asset dysfunction. Policy recommendations to overcome this are to include the Sex Education and Sakinah Family curriculum at all levels of education. Adding the Sakinah Family Online Service feature in the "Pusaka Kemenag Super Apps" and synergizing the Ministry of Religion's services at the Public Service Mall (MPP).

Keywords: *Childfree, Waithood, Freesex, Marriage, Sakinah Family*

**PELESTARIAN LEMBAGA
PERKAWINAN: UPAYA MENCEGAH
DAMPAK EKONOMI KRISIS SEKS
DAN DEPOPULASI AKIBAT PRAKTEK
CHILDFREE, WAITHOOD, DAN
FREESSEX DI INDONESIA**

Makalah kebijakan ini menguraikan bahwa Indonesia sebagai negara yang ditopang oleh budaya religius dan jiwa kekeluargaan tidak menjamin bebas dari ancaman resesi seks. Saat ini, muncul gerakan menunda menikah (*waithood*) dan enggan memiliki anak (*childfree*) banyak dilakukan oleh generasi milenial, bahkan praktek *freesex* sudah melanda kaum pelajar di Indonesia. Kajian ini akan membahas tentang praktek *Childfree*, *Waithood*, dan *Freesex* dikaitkan dengan dugaan telah terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Data menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka pernikahan, peningkatan kasus perceraian, dan penurunan angka kelahiran di Indonesia. Dampak ekonomi yang dikhawatirkan akan timbul setelahnya adalah krisis seks dan depopulasi sebagaimana telah terjadi di Jepang. Tidak hanya sampai di situ, kasus depopulasi di Jepang menunjukkan efek domino pada disfungsi aset. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut adalah memasukan kurikulum Pendidikan Seks dan Keluarga Sakinah di semua jenjang pendidikan. Menambah fitur Layanan Keluarga Sakinah Online di "Pusaka Kemenag Super Apps" dan sinergi pelayanan Kementerian Agama pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kata Kunci: *Childfree, Waithood, Freesex, Perkawinan, Keluarga Sakinah*

Hadiah Ahmad

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar

Email: hadiahahmad1974@gmail.com

**MANAGEMENT STRATEGY TO
IMPROVE THE QUALITY OF
EMPLOYEES AT THE OFFICE OF THE
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF
MAKASSAR CITY**

This policy paper describes the management strategy implemented the Ministry of Religious Affairs Office of Makassar City to improve the quality of employees. This paper uses a qualitative approach with a case study method, where data is obtained through in-depth interviews with key informants, participant observation, and documentation. The results of this article show that the management strategy implemented the Ministry of Religious Affairs Office of Makassar City is not optimal in improving the quality of employees and has not been able to create a professional work culture. Factors that cause less than-optimal management strategies include a lack of training and development for employees, not yet optimal planning and organizing systems, and an unsupportive organizational culture. Thus, the author recommends that the Head of the Ministry of Religious Affairs Office of Makassar City create a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement (PKS) between the Ministry of Religious Affairs Office of Makassar City and the Research and Development and Religious Education and Training Center the Ministry of Religious Affairs of South Sulawesi for development and training; proactively providing everything related to complete office facilities and infrastructure; create a Circular on the implementation of the "Employee Performance Assessment System (SISJAPPEG)" application; and create a Circular to produce Employee Performance Reports periodically (monthly) with rewards for outstanding employees.

Keywords: Management, HR, Employee Quality, Work Culture, Employee Performance, Employee Development

**STRATEGI MANAJEMEN
MENINGKATKAN MUTU PEGAWAI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAKASSAR**

Makalah kebijakan ini menguraikan tentang strategi manajemen yang diterapkan pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam rangka meningkatkan mutu pegawai. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipan, dan dokumentasi. Hasil tulisan menunjukkan bahwa strategi manajemen yang diterapkan pada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Makassar belum optimal dalam meningkatkan mutu pegawai dan belum mampu mewujudkan budaya kerja yang profesional. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya strategi manajemen tersebut antara lain: kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pegawai, belum optimalnya sistem perencanaan dan pengorganisasian, serta budaya organisasi yang belum mendukung. Dengan demikian, penulis merekomendasikan kepada Kepala Kankemenag Kota Makassar untuk membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Perjanjian Kerja Sama* (PKS) antara Kankemenag Kota Makassar dengan Balai Litbang dan Diklat Keagamaan Kemenag Kota Makassar untuk pengembangan dan pelatihan; proaktif menyediakan segala hal yang terkait dengan sarana dan prasarana kantor yang lengkap; membuat Surat Edaran penerapan aplikasi "Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SISJAPPEG)"; serta membuat Surat Edaran pembuatan Laporan Kinerja Pegawai secara berkala (bulanan) dengan *reward* kepada pegawai berprestasi.

Kata Kunci: Manajemen, SDM, Mutu Pegawai, Budaya Kerja, Kinerja Pegawai, Pengembangan Pegawai

Gaspar Tokan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

Email: tokangaspar1980@gmail.com

**RELIGIOUS HARMONY IN THE
RELIGIOUS MODERATION VILLAGE OF
OELETA – KUPANG CITY, EAST NUSA
TENGARA**

This policy paper explains that the socialization of religious moderation villages in Oeleta, Kupang City has not yet functioned optimally, so it still requires additional regulations from the regional government in the form of Governor's Regulations (Pergub) or Mayor's Regulations which focus on regulating the development of religious moderation villages. The purpose of writing this policy paper is to find out the ideal socialization regarding the importance of religious moderation villages and law enforcement regulations related to tolerance in the religious moderation village area in Oeleta. The writing method used is qualitative with a descriptive approach to the results of data findings in the field through observation, interviews, and documentation. The results show that the pilot religious moderation village launched by the Ministry of Religious Affairs in Oeleta does not yet have regulations (Regional Regulations) that form a legal basis, either in the form of NTT Provincial Governor Regulations or Kupang Mayor Regulations. Thus, the author recommends that the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Nusa Tenggara Province and the Government of East Nusa Tenggara Province, especially the Governor, make policies to maintain harmony and tolerance between religious communities in NTT, especially in the City of Kupang by strengthening regulations aimed at providing a legal basis for efforts made, carried out to increase religious moderation and tolerance; creating a conducive environment for the development of religious moderation and tolerance; and preventing violations of the principles of religious moderation and tolerance.

Keywords: Harmony, Ummah, Religious Moderation, Tolerance, Regulation

**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA
OELETA – KOTA KUPANG, NUSA
TENGARA TIMUR**

Policy paper ini menguraikan bahwa sosialisasi kampung moderasi beragama yang ada di Oeleta, Kota Kupang belum maksimal berfungsi, sehingga masih membutuhkan regulasi tambahan dari pemerintah daerah berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Wali Kota yang fokus mengatur tentang pengembangan kampung moderasi beragama. Tujuan penulisan makalah kebijakan ini untuk mengetahui sosialisasi ideal mengenai pentingnya kampung moderasi beragama dan regulasi penegakan hukum terkait toleransi di wilayah kampung moderasi beragama di Oeleta. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif hasil-hasil temuan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa percontohan kampung moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama yang ada di Oeleta belum memiliki regulasi (Peraturan Daerah) yang menjadi landasan hukum, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi NTT maupun berupa Peraturan Wali Kota Kupang. Dengan demikian, penulis merekomendasikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Gubernur membuat kebijakan untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di NTT, khususnya di Kota Kupang dengan memperkuat regulasi yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan moderasi beragama dan toleransi; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya moderasi beragama dan toleransi; serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dan toleransi.

Kata Kunci: Kerukunan, Umat, Moderasi Beragama, Toleransi, Regulasi

Hasanul Fikri

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Email: fikri.1201@gmail.com

DEVELOPMENT OF RELIGIOUS MODERATION BASED ON REGIONAL POTENTIAL IN ACEH PROVINCE

This policy paper explains that Aceh Province has special characteristics compared to other provinces in Indonesia, namely in terms of regional regulation, social life, and culture. However, the existence of these special characteristics has a negative impact on the low KUB index and religious moderation. Thus, an analysis is needed to solve this problem. The analysis method used to solve the problem is qualitative and the data will be analyzed using SWOT as a basis for using potential as a resource in solving the problem. The results of the analysis reveal that: 1) There is no need to make changes to the indicators of the religious harmony index in Aceh Province if the development of religious moderation has been implemented optimally, namely by maximizing the role of actors of religious harmony, budget, and managerial in the development of religious moderation; 2) The development of religious moderation is carried out by using the potential of existing strengths as supporters to create religious harmony in the application of religious moderation. The conclusion is that the development of religious moderation can be carried out by accommodating the special characteristics and characteristics of the region.

Keywords: Religious Moderation, Regional Potential, Tolerance, KUB Index

PEMBANGUNAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS POTENSI KEDAERAHAN PADA PROVINSI ACEH

Policy paper ini menguraikan bahwa Provinsi Aceh mempunyai karakteristik istimewa dibanding dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, yakni dalam hal pengaturan daerah, kehidupan sosial, dan budaya. Namun adanya keistimewaan tersebut memberikan dampak negatif pada rendahnya indeks KUB dan moderasi beragama. Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisa untuk memecahkan persoalan tersebut. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah kualitatif dan data akan dianalisa dengan menggunakan SWOT sebagai dasar untuk menggunakan potensi sebagai sumber daya dalam pemecahan masalah. Hasil analisis mengungkapkan bahwa: 1) Tidak perlunya melakukan perubahan atas indikator indeks kerukunan umat beragama pada Provinsi Aceh jika pembangunan moderasi beragama sudah dilaksanakan dengan optimal, yakni dengan memaksimalkan peran aktor-aktor kerukunan umat beragama, anggaran, dan manajerial dalam pembangunan moderasi beragama; 2) Pembangunan moderasi beragama dilakukan dengan menggunakan potensi kekuatan yang ada sebagai pendukung untuk menciptakan keharmonisan umat beragama dalam penerapan moderasi beragama. Kesimpulannya bahwa pembangunan moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengakomodir keistimewaan dan karakteristik khusus daerah.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Potensi Daerah, Toleransi, Indeks KUB

Khairulmen

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Email: Razzaq_3ok@yahoo.com

**INTER-RELIGIOUS HARMONY POLICY
AND INCREASING SOCIAL CAPITAL IN
PADANG CITY**

This article describes the diversity in Padang City society which can be a potential for building strength and harmony in social life. One aspect of diversity is differences in religion and beliefs between religious communities. This study aims to understand inter-religious harmony and increase social capital in Padang City. This article was studied using qualitative methods, where data was collected through in-depth interviews as well as observation and documentation. Then the data is analyzed using an interactive model, which includes: data reduction steps, data presentation, and data verification, which is supported by triangulation. The results of this study found that inter-religious harmony and social capital in Padang City are quite good. Obstacles in religious harmony include a lack of funding support for activities, a lack of understanding of the important meaning of religious harmony, and there are still conflicting perceptions between interfaith figures in understanding religious harmony. Thus, this policy study recommends the need to increase religious harmony through: (1) further education and outreach programs to the community; (2) intensive dialogue between religious figures and between interfaith youth; and (3) additional support from the Ministry of Religion and all related elements of society. The results of this study can provide information to stakeholders and input for making better policies.

Keywords: Policy, Harmony, Religious Community, Social Capital

**KEBIJAKAN KERUKUNAN
ANTARUMAT BERAGAMA DAN
PENINGKATAN MODAL SOSIAL
DI KOTA PADANG**

Artikel ini menguraikan tentang keragaman dalam masyarakat Kota Padang yang dapat menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek keragaman adalah perbedaan agama dan keyakinan antarumat beragama. Kajian ini bertujuan untuk memahami kerukunan antarumat beragama dan peningkatan modal sosial di Kota Padang. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan model interaktif, yang meliputi: langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, yang didukung dengan triangulasi. Hasil kajian ini menemukan bahwa kerukunan antarumat beragama dan modal sosial yang ada di Kota Padang cukup baik. Kendala-kendala dalam kerukunan umat beragama adalah kurangnya dukungan pendanaan kegiatan, kurangnya pengertian tentang makna penting kerukunan umat beragama, dan masih ada pertentangan persepsi antartokoh lintas agama dalam memahami kerukunan umat beragama. Dengan demikian, maka kajian kebijakan ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerukunan umat beragama melalui: (1) program edukasi dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat; (2) dialog intensif antartokoh agama maupun antar-pemuda lintas agama; dan (3) tambahan dukungan dari Kementerian Agama dan segenap unsur masyarakat terkait. Hasil kajian ini dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan masukan untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan, Kerukunan, Umat Beragama, Modal Sosial

